

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta kegiatan pengelolaan keuangan baik yang terkait dana APBN maupun APBD sehingga dapat meminimalisir bahkan mencegah bentuk-bentuk penyelewangan yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi.

3. Untuk mengoptimalkan kinerja Kejaksaan dalam penegakan hukum pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar melengkapi kewenangan Institusi tersebut untuk dapat menerobos ketentuan atau prosedur yang ada yang selama ini menghambat proses penyidikan dan penambahan anggaran yang memadai untuk dapat membiayai operasional penyidikan dan penuntutan sebagaimana halnya yang dilakukan terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang tentunya harus pula didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur jaksa dengan secara kontinyue melakukan pelatihan dan pendidikan teknis sehubungan dengan penanganan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. 2008. *Menguak Realitas Hukum*. Kencana, Jakarta.

_____. 2010. *Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Kencana, Jakarta.

_____. *Kewenangan Penyidikan Kejaksaan*. Legal Opinion (keterangan sebagai ahli yang diajukan oleh Kejaksaan

Agung) pada sidang *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi di Jakarta, tanggal 27 Januari 2012

- Amiruddin. 2010. *Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa*. Genta Publisihing, Yogyakarta.
- Anwar , Yesmil dan Adang. 2011. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Widya Padjajaran, Bandung
- Arief, Barda Nawawi . 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Panggulangan Kejahatan*. Kencana , Jakarta.
- _____ . 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Arrsa, Ria Casmi. 3 Agustus 2010. *Korupsi Cermin Kolonialisme, Kanker Demokrasi dan Optimisme terhadap Pemberantasannya*. (<http://suwardibarnadalzz.wordpress.com>).
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2004. *Sekitar masalah Korupsi Aspek nasional dan Aspek Internasional*. Mandar Maju, Bandung.
- _____ . 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. ,Erekop, Bandung.
- Bachri, Syaiful 2009. *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan*, Total Media, Yogyakarta
- Chaeruddin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah. 2008 *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama, Jakarta, 2008.
- Chazawi, Adami, 2009. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* , PT.Alumni, Bandung.
- Effendi , Marwan. 2005 *Kejaksaan RI* , Posisi dan Fungsinya dari Prespektif Hukum. PT. Gramedia ,Jakarta.

- _____. 2012. *Sistem Peradilan Pidana , Tinjauan terhadap beberapa perkembangan Hukum Pidana*, Referensi. Jakarta.
- _____. 2012. *Kapita Selekta Hukum Pidana Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*. Referensi ,Jakarta.
- Fuady , Munir , 2006, *Teori Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Friedman , Lawrence M. 1984. *Hukum Amerika : Sebuah Pengantar*. Terjemahan Wishnu Basuki. 2001. PT.Tata Nusa,Jakarta.
- Gofar Abdul, 2003. *Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Puslitbang Kejaksaan Agung RI. Jakarta.
- Hamzah,Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Hamzah , Jur Andi.2008. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Harahap, Krisna. 2009. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia Jalan Tiada Ujung*. Grafitri, Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Isra, Saldi, 2009. *Catatan Hukum Saldi Isra, Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*. Kompas , Jakarta.
- Iswahyudi, Sudono. *Konsepsi Peradilan Pidana Terpadu dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Permasalahannya*. Makalah disajikan dalam Seminar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI,Jakarta 24 September 2003
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI. 2005. *Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta.

- _____. 2012 . *Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta.
- Kaligis,OC. 2006. *Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Khusus dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PT.Alumni,Bandung.
- Kristiana, Yudi. 2006. *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang,P.A.F dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-delik Khusus, Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Tipikor*. Sinar Grafika , Jakarta.
- Mahfud, Moh. 2011. *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. PT.Alumni, Bandung.
- Nurdjana,IGM. 2010 *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*.Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Poerwadarminta,W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN.Balai Pustaka, Bandung.
- Sudirman dan Nizar Suhendra, *Korupsi Masyarakat Indonesia*, Kemitraan, Jakarta.
- Sumaryanto.A.Djoko. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian kerugian Keuangan Negara*. Prestasi pustaka Raya,Jakarta.
- Surachman dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Sinar Grafika , Jakarta.
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. 2007. Visimedia.Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 2008. Pustaka New Merah Putih, Yogyakarta.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2008. Pustaka New Merah Putih, Yogyakarta.

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2008. Pustaka New Merah Putih, Yogyakarta.

Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2008. Pustaka New Merah Putih, Yogyakarta.

Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.2012.Sinar Grafika, Jakarta.

Viva News Rabu 4 Agustus 2010 , *korupsi meningkat 50 persen*,
<http://fokus.news.viva.co.id/news/read/168991->

Wijaya, Firman. 2008. *Peradilan Korupsi, Teori, dan Praktik*. Maharani Perss, Jakarta.

